



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 5
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / ke - 1
Dengan	: KEPALA BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, <b>5 MARET 2019</b>
Waktu	: Pukul <b>13.00</b> WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: <b>Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: 1. Pelaksanaan APBN TA 2019 2. Evaluasi Penanganan Bencana Tahun 2018
Hadir	: .... orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 1. Kepala BNPB

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul **13.54** WIB dan dinyatakan Terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Dr. H.TB. Ace Hasan

Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc. dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas “Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan Evaluasi Penanganan Bencana Tahun 2018” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi penjelasan realisasi serapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 sebesar Rp. 7.114.493.678.962 (*Tujuh triliun seratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 98.92%:
2. Komisi VIII DPR RI mendesak kepala BNPB untuk mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran tahun 2019 secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja BNPB dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia dan selanjutnya mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi BNPB dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi/pakar, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media dan lembaga Internasional dalam penanggulangan bencana.
  - b. Mendorong BNPB melakukan kajian akademik sebagai dasar untuk perubahan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana.
  - c. Melakukan penguatan program mitigasi bencana, antara lain:
    - 1) Memprioritaskan program mitigasi bencana untuk peningkatan *multy hazard early warning system*.

- 2) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
- 3) Memperhatikan dengan sungguh-sungguh hasil riset yang dilakukan oleh BNPB, Perguruan Tinggi, maupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan dalam kebijakan penanggulangan bencana.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA**

ttd

**Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**